

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Percikan Pemikiran tentang Jabatan dan Akta PPAT*, Revika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Astini, Titin dan Aah Johariyah, 2004, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasibuan, Abdurrozaq, 2003, *Metode Penelitian*, Multi Grafika, Medan.
- Helmi, Masdar, 1973, *Dakwah dalam Alam Pembangunan I*, Toha Putra, Semarang.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kadarisman, M., 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A.P., 1991, *Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Peranginangin, Effendi, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, HB, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2004, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2004, *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Wahab, Abdul, *Solichin*, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).
- Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5893).
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 395)
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## **C. Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi) dan Artikel Jurnal**

- Chasana, Nur Fattiyah, 2020, "Pelaksanaan Penyampaian Laporan Bulanan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kantor Pertanahan dikota

- Balikpapan“ *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Komala, Risma Dwi dkk, “Tinjauan Implementasi Personal Selling Pada PT. Astra Internasional Daihatsu Astra Biz Center Bandung Pada Tahun 2017”, *Jurnal Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom*, Vol 3 Nomor 2, Agustus 2017.
- Mouw, Yolanda, 2018, Peranan Kepala Kantor pertanahan Kota Makassar Dalam Melakukan pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putri, Annisa Aisyah, “Tanggung Jawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Hak Milik Pada Proses Balik Nama (Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2017)”, *Jurnal Notary*, Volume 1, No. 01, 2019.
- Ramli, Asmaran, 2011, Penerapan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pejabat pembuat Akta Tanah oleh Pejabat Pada Badan Pertanahan, *Thesis*, Universitas Hassanudin Makassar, Makassar.
- Sari, Ratih Mega Puspa & Gunarto, “Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2018.
- Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Al Amwal*, Volume 2, No. 1, Agustus 2019.
- Triastina, Kusumaning, 2014, “Pelaksanaan Peraturan Kepala Kantor pertanahan Nasional Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Terkait dengan kinerja PPAT di Kota Yogyakarta”, *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yoan, Ricki, dkk, “Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 2, November, 2017.
- Zulfikar, Riza, “Peran PPAT Dalam Pencegahan Pemilikan Tanah Absentee”, *Sosiohumanitas Journal*, Vol. 19, No. 1, Maret, 2017.

#### D. Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Jambi, “Jarak Kota Jambi (Kota Baru) ke Beberapa Ibukota Kabupaten dalam Propinsi Jambi”, <https://jambikota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 September 2021 Pukul 20.50 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 2 April 2021 Pukul 18.30 WIB.